

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan Putusan
No.141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)



OLEH:

A. MUH. NUR MAARIF NURDIN

B 111 12 914

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan
No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada bagian Hukum Pidana
Program studi Ilmu Hukum

Oleh

A. MUH NUR MAARIF NURDIN

B 111 12 914

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.
Dan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.)**

Disusun dan diajukan oleh

**A. MUH NUR MAARIF NURDIN
B111 12 914**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 16 Agustus 2016
Dan Dinyatakan Diterima

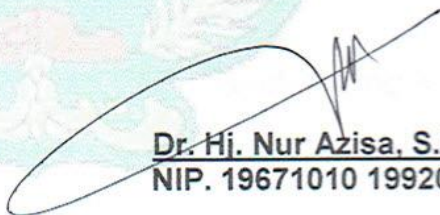
Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 19590317 1987 031002**



**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 1992032 002**

**An. Dekan
Wakil Dekan I,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607198601 1 003**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : **A. MUH. NUR MAARIF N.**
Nomor Induk : **B 111 12 914**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**
(Studi Kasus Putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
dan Putusan No.141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal.

Makassar, Maret 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP . 19590317 1987 031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP.19671010 1992032 002

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Agakkan bahwa skripsi mahasiswa :

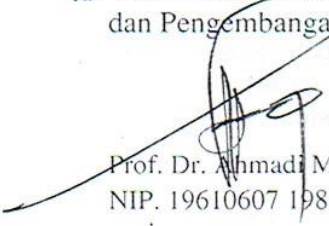
Nama : ANDI MUH NUR MAARIF N
Nomor Pokok : B11112914
Program Studi : Ilmu Hukum
Kategori : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan
No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan Putusan
No.141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2016

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan


Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Andi Muh. Nur Maarif Nurdin (B111 12 914) “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan Putusan No.141/Pid.Sus/2015/PN. Mrs. (Penulisan Skripsi ini dibimbing oleh Prof. Dr. Muhadar,SH.,MH, selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Azisa, SH.,MH. Selaku Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No.140/Pid.Sus/ 2015/PN.Mrs. dan putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan putusan No. 141/Pid.Sus/ 2015/PN.Mrs.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh dari data sekunder dari hasil wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menerangkan 1). Penerapan hukum pidana materiil terhadap delik penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. 2) Pertimbangan hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serai fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHPidana yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis patut haturkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Ir. Muh. Nurdin D. M.si** dan Ibunda **Dr. Haeranah S.H.,M.H.**, yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih juga kepada kakak dan adik penulis, **Muh Farid Nurdin** dan **Andi Muh Lutfi Nurdin**, serta kepada seluruh keluarga yang turut membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Pada proses penulisan skripsi, penulis mendapatkan begitu banyak sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak :

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. **Ibu Prof. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan, **Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan I, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan II, serta **Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si.**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melipahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk bapak dan ibu.
4. **Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.**, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.**, **Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.**, selaku tim penguji, atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis.
5. **Bapak Prof. Muhadar, S.H.,M.Si.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Beserta seluruh dosen-dosen Bagian Hukum Pidana yang telah membuat penulis tertarik kepada Hukum Pidana. Ilmu dan

pemikiran para dosen Hukum Pidana yang dibagikan kepada penulis telah yakin untuk memilih Hukum Pidana sebagai jurusan yang mampu menjadikan hukum instrumen dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Para dosen serta segenap civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi yang telah memberi masukan, didikan dan bantuannya. Serta seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik ini.
7. **Pengadilan Negeri Kelas IB. Maros** yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
8. **Keluarga Besar Lorong Hitam, Petitum 2012, Scout Dubels Makassar**, yang telah berperan menciptakan lingkungan yang baik bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan **Akbar, Rian, Fajar, Upi, Yani, Agus, Novi, Arya, Andi, Jack, Afif, Yuda, Fachrul, ainunm, cimo, Romi, Dudin, Danyal**, terima kasih kepada kalian yang telah menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama proses perkuliahan.
10. Saudara-saudara penulis **Ahmad Fadly Mappeaty, Luthfi Nawiruddin, M. Yusri Awal, M. Fadlan Rahmat, Anzhari Djumingin**, yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

11. Teman-Teman KKN Gel. 90 Universitas Hasanuddin Kec. Paleteang Kab, Pinrang, Khususnya Teman-teman Kel. Mamminasae Zulfikar, Nur Afiah, Tryana Putri, Mustikam yang telah bekerja sama dengan penulis dalam ber-KKN.

12. Semua Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala kekurangannya dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 2 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. KEGUNUANN PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. TINDAK PIDANA.....	7
1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	11
2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	18
B. NARKOTIKA	18
1. PENGERTIAN NARKOTIKA	20
2. JENIS-JENIS NARKOTIKA.....	26
3. TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	28
4. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA	36
C. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	36
1. PENGERTIAN PENYALAHGUNAAN	36
2. PENGERTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	36
D. PENYERTAAN	38
1. PENGERTIAN PENYERTAAN	38
2. BENTUK-BENTUK PENYERTAAN.....	39

E. PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	45
1. PENGERTIAN PIDANA DAN PEMIDANAAN	45
2. TEORI DAN TUJUAN PEMIDANAAN	48
3. JENIS-JENIS PIDANA	49
F. PERIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. LOKASI PENELITIAN	58
B. JENIS SUMBER DATA	58
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	58
D. ANALISIS DATA	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA	60
BAB V PENUTUP.....	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan darurat atau memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya di lingkup perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Berbicara tentang tindak pidana narkotika, maka kita selalu diperhadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaannya berdampak negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara (O.C Kaligis; 2002: VII)

Tapi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi disertai dengan berkembangnya teknologi dibidang kedokteran dan farmasi, pada satu sisi membawa pengaruh positif dalam peningkatan taraf kesehatan manusia, tetapi sisi lain ada pula dampak yang ditimbulkan dari teknologi ini. Khususnya dibidang farmasi membawa pengaruh negatif di dalam masyarakat, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menyalahgunakan kemajuan tersebut. Seperti mengedarkan dan memperjual belikan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan tanpa adanya pengawasan dari dokter dan petugas kesehatan, dan pada akhirnya kemudian narkotika tersebut sampai di tangan pengguna/pemakai yang menggunakan tanpa pengawasan dokter (penyalahgunaan narkotika). Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika sering kali dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama sebagaimana yang Penulis akan teliti pada penulisan skripsi ini terhadap Putusan Nomor No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. Di mana terdakwa berinisial Mi dan Rm yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika di pos ronda BTN Maccopa Indah Desa Bonto Kec. Mandai Kab. Maros

pada pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 00.15 wita.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang tidak semestinya. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan ketergantungan sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Ditambah lagi, kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Peredaran narkotika, secara ilegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini, semakin meningkat. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika kini sudah di jadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkotika internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah besar.

Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba secara tuntas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba membawa nuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, sebab undang-undang ini memiliki perbedaan atau spesifikasi dalam penanganan kasus-kasus narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi hanya berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja dari pada badan tersebut akan semakin optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, dan rumitnya masalah-masalah seputar narkoba, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan/ karya ilmiah dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan

No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan Putusan
No.141/Pid.Sus/2015/PN. Mrs.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs?
- B. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No.140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan putusan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademis, kalangan penegak hukum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama dan juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum serta beberapa istilah lain.

Menurut Pompe (Lamintang; 1997 : 182) mengatakan bahwa:

"Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overteder shuld heft en waarvan de bestraffing diensting is voor de handhaving der rechts orde de behartiging van algemeen welzijn*".

Selanjutnya menurut J.E Jonkers (Adami Chazawi; 2002: 75) yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

P.A.F Lamintang (1984 : 172) menyatakan bahwa kata *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda terdiri atas kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Meski demikian, sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.

Menurut Simons (Sofjan Sastrawidjaja, 1990 : 113) bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut van Hamel (Sofjan Sasrawidjaja, 1990 : 113) mengartikan *strafbaar feit* adalah sama yang dirumuskan oleh Simons, tetapi van Hamel menambahkan dengan kalimat “kelakuan itu harus patut dipidana”.

Moeljatno (Sofjan Sastrawidjaja, 1990 : 115) memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*.

Menurutnya bahwa :

“Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping

mencocoki syarat-syarat formil yaitu perumusan undang-undang yang juga mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patu dilakukan”.

Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menggunakan istilah tindak pidana yang rumusannya : tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Satochid Kartanegara (Sianturi, 1983 : 208) menterjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

Tresna (Sianturi, 1983 : 209) :

menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana yakni suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Suatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan

Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 231) menyatakan bahwa hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk

digunakan ialah delik “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Menurut Sofjan Sastrawidjaja (1990 : 111) bahwa istilah yang paling populer yang dipakai di Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah istilah tindak pidana, jika diperhatikan buku-buku hukum pidana, instansi penegak hukum dan para penegak hukum pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam KUHP terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena kalau ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

Selanjutnya apabila mengikuti perkembangan lahirnya perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP, maka ternyata pembentuk undang-undang memilih istilah tindak pidana, misalnya Undan-Undang Tindak Pidana Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 8 tahun 2010), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007) dan sebagainya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi (2002 : 79) bahwa unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- 1) Dari sudut pandang teoritis.

Teroris artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- 2) Dari sudut pandang undang-undang.

Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan Jonkers (Adami Chazawi, 2002: 81) merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III KUHP masuk dalam kelompok pelanggaran, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2002: 82) yaitu :

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat

dikategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.

Unsur subjektif yang meliputi.

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

- e. Dengan rencana lebih dulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam perbuatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (Haeranah, 1990 : 14) bahwa terdapat 2 (dua) pandangan atau aliran tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme dianut oleh antara lain Simons dan Jonkers, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Mencocoki rumusan delik/tindak pidana;
- b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* (tidak ada alasan pemaaf dan dapat dipertanggungjawabkan).

Menurut aliran monisme tersebut sifat melawan hukum dan kesalahan adalah termasuk unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian jika ada tindak pidana di situ ada orang yang dapat dipidana, tanpa itu tidak ada tindak pidana. Sebagai contoh : lelaki A (seorang orang gila) disuruh oleh si B untuk memperkosa seorang perempuan C. kemudian si A benar-benar memperkosa si C, sedangkan ia (si A) tidak mampu bertanggung jawab. Dalam contoh tersebut jika ditinjau dari sudut pandang aliran monisme, maka pada peristiwa tersebut tidak ada tindak pidana yang terjadi, oleh karena unsur pertanggungjawaban si pelaku tidak ada, yaitu si A (seorang orang gila) tidak dapat dipertanggungjawabkan

menurut Pasal 44 KUHP. Jadi dalam peristiwa tersebut tidak ada tindak pidana yang terjadi karena unsur pertanggungjawaban pelaku tidak ada, hal berarti bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana karena syarat-syarat pemidanaan tidak cukup.

Sedangkan aliran dualisme menurut Andi Zainal Abidin Farid (Haeranah, 1990 : 15) dengan menyatakan bahwa untuk memidana seseorang harus dipisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feit* dan *dader*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri, yaitu :

- a. Unsur-unsur perbuatan (*handlung*) yakni
 1. Mencocoki rumusan delik (tindak pidana),
 2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
- b. Unsur-unsur pembuat (*handelende*), yakni :
 1. Adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*),
 2. Kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).

Apabila contoh kasus tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang aliran dualisme, maka di situ tetap ada tindak pidana yang terjadi, meskipun kemampuan bertanggung jawab pada diri si pelaku tidak ada (si gila tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP). Oleh Karena kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk unsur perbuatan (*feit*) melainkan termasuk

unsur pembuat (*dader*). Dengan demikian walaupun unsur kemampuan bertanggung jawab pada diri si pelaku tidak ada, namun di situ tetap ada tindak pidana, dan yang harus dipidana adalah pembuat tidak langsung yaitu si B. dalam kasus yang demikian terjadi bentuk penyertaan yang disebut menyuruh melakukan (*doen pleger*).

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusianasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi kurang lebih 30 sampai 60 detik diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*euforia*). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

Berikut beberapa pengertian mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
merumuskan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Smith Kline dan Clinical Staff (Taufik Makaro dkk,2003: 18)

membuat pengertian tentang narkotika sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintetis (*memperidine, methadone*).”

Hari Sasangka (2003: 33-34) menjelaskan bahwa pengertian lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen, depressent, dan stimulant*.

M. Ridha Ma'ruf (Hari Sasangka, 2003: 33-34) mengambil kesimpulan dari kedua pengertian tersebut, yaitu :

- 1) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narktika sintetis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintetis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.
- 2) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, hal ini berbahaya bila disalahgunakan.

- 3) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Hari Sasangka, 2003: 35)

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika yang terbuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu *cocain*, ganja dan candu atau opium (Hari sasangka, 2003: 35).

a. Kokain

Kokain adalah suatu alkalodia yang berasal dari daun *erythroxylon coca L.* tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di bagian daratan tinggi Andes Amerika Selatan Khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar (Hari Sasangka, 2003: 55).

Rasa bau daun *Erythroxylon Coca L* seperti teh dan mengandung kokain, daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan seolah-olah menyegarkan badan.

Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot. Bunga *Erythroxylon Coca L*, selalu tersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih .

Kokain yang dikenal sekarang ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1855, di mana dampak yang ditimbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan *cocaine* lainnya yang terkenal adalah coca-cola yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pomberton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan *cafein*. Namun karena tekanan publik penggunaan kokain pada coca-cola.

Dalam bidang ilmu kedokteran kokain dipergunakan sebagai anastesti (pematasi rasa) lokal :

- 1) Dalam pembedahan mata, hidung dan tenggorokan.
- 2) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyebarkan larutan kokain.
- 3) Menghilangkan rasa nyeri saat dibersihkan dan dijahit. Ara yang digunakan adalah menyuntukkan kokain subkutan.
- 4) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ektradural bagian lumba, anastesi lumba (Hari Sasangka, 2003: 58)

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Connabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman mudah tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

Nama semaran ganja banyak sekali, misalnya *indian hemp, rumput barang, daun hijau, bunga, ikat, labang, jayus, jun*. Remaja di Jakarta menyebutnya *gele* dan *cimeng*. Di kalangan pecandu disebut *grass, marihuana, hasa, hashish*. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang pergaulan, sebab di dalam pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri.

Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi kedalam lima bentuk, yaitu :

- 1) Berbentuk rokok linting yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti rokok.
- 3) Berbentuk campuran daun, tangkai, dan biji untuk dihisap seperti rokok.
- 4) Berbentuk bubur dan dammar yang dapat dihisap melalui hidung.

- 5) Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun (Hari Sasangka, 2003: 50)

Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak ditulis oleh banyak ahli. Efek tersebut lebih banyak buruknya dari pada baiknya. Penggunaan ganja sendiri lebih banyak untuk tujuan negatif daripada tujuan yang positif seperti untuk pengobatan. Efek penggunaan ganja menurut Frenz Bergel meliputi efek fisik dan psikis (H. M. Ridha Ma'ruf, 1976: 22).

c. Candu

Candu atau opium, merupakan sumber utama dari narkotika alam, berbagai narkotika berasal dari *alkolodia candu*, misalnya *morphine*, *heroin*, berasal dari tanaman *papaver somniferum* L dan dari keluarga *papeverceae*. Nama *papaver somniferum* L merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan *papaver somniferum* L juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pavot somnivere*.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan tentang batasan-batasan candu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan candu adalah:

1. Tanaman *papaver somniferum* / dari semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* / yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
 3. Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatannya.
 - b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing,
- Menurut Smith Kline (Hari Sasangka, 3003 : 41) bahwa gejala putus obat (*uithdrawel*) dari candu adalah sebagai berikut :
- 1) Gugup, cemas dan gelisah;
 - 2) Pupil mengecil dan bulu roma berdiiri;

- 3) Sering menguap, mata dan hidung berair dan berkering;at;
- 4) Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit;
- 5) Diare, tidak dapat beristirahat dan mual-mual;
- 6) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur;
- 7) Pernafasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah;
- 8) Perasaan putus asa.

Dari uraian jenis narkotika di atas, maka dapat menggolongkan menjadi 3 kelompok seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a) Narkotika golongan I : Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I yaitu *opium morphine, kokain, heroin* dan lain-lain.
- b) Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu *ganja, ekstasi, shabu-shabu, hashis* dan lain-lain.

- c) Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III, seperti *etilmorfina, kodeina dan lain-lain* termasuk campuran atau sediaan *difenoksin* dengan bahan lain bukan narkotika.

3. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan itu sendiri.

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I (Ketentuan Umum) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP merumuskan bahwa jika suatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan

pidana umum, tetapi terdapat juga ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dikenakan adalah ketentuan khusus yaitu UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini merupakan asas (*lex specialis derogate legi generali*) yang artinya undang-undang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan tersebut tidak terjadi hanya dalam hukum materilnya, seperti dikemukakan di atas, tetapi juga dalam hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, terhadap hukum materilnya adalah :

- a. Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum.
- b. Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif.
- c. Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan jika dilakukan secara sempurna (Pasal 132 ayat (1)).

Kekhususan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009, terhadap hukum formilnya adalah :

- a. Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor.
- b. Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHAP.
- c. Perkara narkoba termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya.
- d. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana narkoba.
- e. Masa penangkapan bagi tersangka tindak pidana narkoba dapat lebih dari satu hari (dua puluh empat jam)

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Adapun jenis tindak pidana narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 antara lain sebagai berikut :

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau dipidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal ini perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan Paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal ini penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka segala perbuatan penyalahgunaan narkotika mengacu pada undang-undang ini, dan

diharapkan undang-undang ini secara efektif berguna di masyarakat sehingga terbebas dari bahaya obat-obatan terlarang yang merusak generasi bangsa.

C. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*” yaitu mempergunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya (H. M. Ridha Ma'ruf, 1976: 9)

2. Pengetian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika, tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Pasal 1 angka 15 hanya merumuskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Khusus untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur pada Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 yang rumusannya adalah :

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

D. Penyertaan (Delneming)

1. Pengertian Penyertaan

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerja sama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam sistem kita KUHP, Penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Adapun beberapa pakar hukum pidana yang memberikan penafsiran sebagai berikut :

Moeljatno (1985: 63) merumuskan:

“Ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana”.

Lebih lanjut **S.R Sianturi** (1983: 338) memberikan penafsiran:

Makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Sedangkan **Wirjono Prodjodikoro** (1986: 108) mengartikan penyertaan:

Penyertaan sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan seperti yang diatur dalam buku I ketentuan umum Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum yakni *daders* atau *principals* dan *accessories*.

Rumusan Pasal 55 :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Rumusan Pasal 56 :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penyertaan dalam arti luas meliputi :

- a. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 terdiri :
 1. Orang yang melakukan (*pleger*);
 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);
 4. Orang yang mennggerakkan/membujuk (*uitlokker*); dan
- b. Pembantu (*medeplichtige*).
 1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan;
 2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Selanjutnya akan dibahas tentang masing-masing bentuk penyertaan tersebut :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Barda Nawawi Arief (1993 : 30) menyatakan bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Selanjutnya Sianturi (1993 : 339) menyatakan bahwa petindak adalah barangsiapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur delik (termasuk unsur subyek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Menurut Barda Nawawi Arief (1993 : 31) bahwa *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian :

a. Pada *doenpleger* (menyuruh melakukan) ada 2 (dua) pihak, yakni :

1. Pembuat langsung (*onmiddelijke dader/auctor psysicus/ manus ministra*)
2. Pembuat tidak langsung (*middelijke dader doenpleger/auctor intelektualis/moralis/manus domina*)

b. Pada *doen pleger* unsur-unsur sebagai berikut :

1. Alat yang dipakai adalah manusia;
2. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);
3. Alat yang mati itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak dipidana). Unsur ke tiga ini merupakan ciri-ciri dari *doen pleger*.

Hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan (Barda Nawawi Arief, 1993 : 31) ialah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasl 44 KUHP);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);

3. Bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik; misalnya A menyuruh B untuk menguangkan pos wissel yang tanda tangannya dipalsukan oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan tersebut.
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan tersebut; misalnya A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu tempat, B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief (1993 : 31) mengatakan bahwa dalam hal pembuat materiil (alat) seorang yang belum cukup umur (anak), maka tidak ada menyuruh melakukan.

3. Orang turut serta / bersama-sama (*medepleger*)

Undang-undang (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe (Barda Nawawi Arief, 1993 : 33) bahwa turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, misalnya 2 (dua) orang dengan dengan melakukan pencurian di sebuah gudang beras.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, sedang yang lain tidak, misalnya 2 (dua) orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A menyenggol orang yang menjadi sasaran sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut).
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur tindak pidana/delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana, misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 di mana salah seorang melakukan pengrusakan pintu rumah yang menjadi sasaran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diberikan kepada kawannya yang merusak pintu tadi.

Untuk adanya *medepleger* :

1. Ada kerja sama secara sadar;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik

Barda Nawawi Arief (1993 : 34) menyatakan bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup bila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan

tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

4. Penganjur/Pembujuk (*uitlokker*)

Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh KUHP.

Syarat penganjuran/pembujukan yang dapat dipidana :

- a. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang terlarang/tindak pidana;
- b. Menggerakkan dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif, yakni pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan).
- c. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan oleh karena hal-hal tersebut dalam nomor satu dan nomor dua;
 1. Si pembuat materiil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana
 2. Pembantu (*medeplichtige*)

5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggung jawaban *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

Menurut jenisnya menurut Pasal 56 KUHP, ada dua jenis pembantuan :

1. Waktunya : pada saat kejahatan dilakukan;

Caranya : tidak ditentukan secara limitatif (membatasi) dalam undang-undang;

2. Waktunya : sebelum kejahatan dilakukan;

Caranya : ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

E. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukum dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata,

administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”, kadang-kadang digunakan untuk pergantian kata “*straf*”, tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Sementara Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan bahwa:

“Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawaban dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun widaningsih, 2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau cir-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (M. Taufik Makaro, 2005: 16), menyebutkan bahwa:

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata”.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan;

Menurut teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dengan kata lain pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan,

dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Teori ini ditujukan untuk masa yang akan datang, yang di mana bermaksud untuk mendidik orang yang telah berbuat jahat agar tidak mengulangi kembali tindakan melawan aturan atau hukum, dan orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan (*vereningings-Theorien*)

Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana, yang dimana teori ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

3. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

a. Pidana pokok

Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Pidana mati

Menurut Wirjono Prodjokoro (2009: 175), tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam pasal Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkup Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

Menurut P.A.F Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 10) menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancam dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

Menurut Niniek Suparmi (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim/ pengadilan untuk membayar

sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Apabila tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti pidana denda.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok.

Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- 2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dengan kejahatan dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

Ayat (1) yaitu :

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Ayat (2) yaitu :

Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Ayat (3) yaitu :

Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa: apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesemberonoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu,

misalnya Pasal-Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHP.

F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Menurut Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) yang menyatakan bahwa :

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta – fakta didalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;

- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros yang berlokasi pada Pengadilan Negeri Maros. Alasan di pilihnya tempat tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Maros merupakan tempat diajukan perkara dan tempat diputuskannya perkara-perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

B. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung yakni hakim yang memeriksa dan memutus tindak pidana yang penulis teliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh di lokasi penelitian yakni putusan pengadilan dan data yang dikumpulkan melalui literatur, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, koran, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teori dari objek kajian. Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, laporan media cetak, tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak responden dalam hal ini pihak yang terkait dengan objek penelitian yakni hakim.

D. Teknik Analisis Data

Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif kemudian mendeskripsikannya ke dalam sebuah konklusi umum yang akan penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan penelitian (skripsi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dalam Perkara Kasus No. 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs. dan No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan .

Salah satu tindak pidana yang penulis teliti dan analisis dalam penulisan skripsi ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dalam Pasal 127. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang (dilakukan secara bersama-sama) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP

1.1 Posisi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Pos Ronda BTN Maccopa Indah, Desa Bonto Matene, Kec. Mandai, Kab Maros telah terjadi tindak pidana penyalaghunaan narkotika golongan I yang dilakukan secara

bersama-sama yakni Risal dan Roy. Yang pada mulanya Muhammad Irsal als Irsal mengajak Roy Marthen alias Roy untuk patungan membeli shabu seharga Rp. 100.000,- lalu Roy Marthen alias Roy menyerahkan uang Rp. 50.000.- kepada Muhammad Irsal alias Irsal, kemudian Muhammad Irsal pergi membeli shabu kepada Wawan (DPO) di Jalan Tanggul Kota Maros seharga Rp. 100.000,- Muhammad Irsal alias Irsal datang membawa 1 (satu) sachet shabu dan menemui Roy Marthen als Roy di pos ronda. selanjutnya Muhammad Irsal alias Irsal dan Roy Marthen alias Roy menggunakan shabu di dalam kamar pos ronda tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang dan memeriksa pos ronda tersebut dan menemukan kedua terdakwa saat menggunakan shabu, sehingga langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.2 Dakwaan Penuntun Umum

a) Putusan Perkara Nomor 140/Pid.Sus./2015/PN.Mrs.

Terhadap terdaka I Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yakni :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irsal Als Risal Bin Darwis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki Roy Marthen Als Roy Bin Yusuf Danunan (berkas perkara terpisah)

pada Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada Bulan Oktober tahun 2015 bertempat di pos ronda BTN Maccopa Indah Desa bonto Matene Kec.Mandai Kab.Maros Prov. Sulsel atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ia tersakwa Muhammad Irsal Als Risal mengajak lelaki Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah) untuk patungan membeli shabu seharga Rp.100.000,-, lalu lelaki Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang Rp.50.000,- kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi membeli shabu kepada lelaki Wawan (DPO) di Jalan Tanggul Kota Maros seharga Rp.100.000,- tidak lama kemudian terdakwa datang membawa 1 (satu) sachet shabu dan menemui lelaki Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah) di pos ronda, selanjutnya terdakwa bersama lelaki Roy Marthen (berkas perkara terpisah) menggunakan shabu di dalam kamar pos ronda tersebut, sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan memeriksa pos ronda tersebut dan menemukan terdakwa bersama lelaki Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah) saat menggunakan shabu, sehingga langsung diamankan oleh kepolisian untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab 24614/NNF/X/2015, tanggal 19 oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S, Si, Msi; Usaman, S,Si; Hasura Muyadi, Amd selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Slamet Isawanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Pollri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0047 gram; 1 (satu) potongan plastik berisikan kristal bening berat nettto 0,0015 gram; 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Roy Marthen als Roy dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Muhammad Irsal als risal adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irsal Als Risal Bin Darwis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki Roy Marthen Als Roy Bin Yusuf Danunan (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Irsal Als Risal mengajak lelaki Roy Marthen Als Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah) untuk patungan membeli shabu seharga Rp. 100.000,-, lalu lelaki Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang Rp.50.000,- kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi membeli shabu kepada lelaki wawan (DPO) di jalan Tanggul Kota Maros seharga Rp. 100.000,- tidak lama kemudian terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) dari botol minuman You.C1000 yang penutupnya terdapat dua lubang dan pada lubang terdapat pipet putih, selanjutnya pada ujung pipet yang satu disambung dengan pireks kaca, lalu shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca sedikit demi sedikit, kemudian pireks kaca dibakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu (terbuat dari kertas pembungkus rokok yang digulung-gulung) dan dijepit dengan ptongan lidi, pada saat shabu dibakar kemudian terdakwa menghisap asapnya melalui ujung pipet yang lainnya secara bergantian dengan lelaki Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah didalam kamar pos ronda tersebut, sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang dan memeriksa pos ronda tersebut dan menemukan terdakwa bersama lelaki Roy Marthen Als Roy (berkas perkara terpisah) saat menggunakan shabu sehingga langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab 24614/NNF/X/2015, tanggal 19 oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S, Si, Msi; Usaman, S,Si; Hasura Muyadi, Amd selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Slamet Isawanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap

barang bukti berupa; 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0047 gram; 1 (satu) potongan plastik berisi kristal bening berat netto 0,0015 gram; 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Roy Marthen als Roy dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Muhammad Irsal als risal adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Putusan Perkara Nomor 141/Pid/.Sus/2015/PN.Mrs.

Terhadap terdaka II Penuntut Umum menggunakan pula dakwaan alternatif, yakni :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Roy Marthen als Roy Bin Yusuf Danunan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki Muhammad Irsal als risal Bin Darwis (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2015 bertempat di pos ronda BTN Maccopa Indah Desa bonto Matene Kec.Mandai Kab.Maros Prov. Sulsel atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) menemui dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu seharga Rp. 100.000,- lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah), setelah itu lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) pergi membeli shabu kepada lelaki wawan (DPO) di jalan Tanggul Kota Maros seharga Rp. 100.000,- tidak lama kemudian lelaki Muhammad Irsal als risal (berkas perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) sachet shabu dan menemui terdakwa di pos ronda, selanjutnya lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa menggunakan shabu di dalam kamar pos ronda tersebut, sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan memeriksa pos ronda tersebut dan menemukan lelaki

Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa saat menggunakan shabu, sehingga langsung diamankan oleh petugas Kepolisian untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab 24614/NNF/X?2015, tanggal 19 oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S, Si, Msi; Usaman, S,Si; Hasura Muyadi, Amd selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Slamet Isawanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0047 gram; 1 (satu) potongan plastik berisikan kristal bening berat nettto 0,0015 gram; 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Roy Marthen als Roy dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Muhammad Irsal als risal adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Roy Marthen als Roy bin Yusuf Danunan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lelaki Muhammad Irsal als Risal Bin Darwis (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) menemui dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu seharga Rp. 100.000,- lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah), setelah itu lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) pergi membeli shabu kepada lelaki wawan (DPO) di jalam Tanggul Kota Maros seharga Rp. 100.000,- tidak lama kemudian lelaki Muhammad Irsal als risal (berkas perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) sachet shabu dan menemui terdakwa di pos ronda, selanjutnya lelaki

Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) merakit alat Hisap shabu (bong) dari botol minuman YouC1000 yang penutupnya terdapat dua lubang dan pada lubang terdapat pipet putih, selanjutnya pada ujung pipet yang satu disambung dengan pireks kaca, lalu shabu dimasukkan kedalam pireks kaca sedikit demi sedikit, kemudian pireks kaca dibakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu (terbuat dari kertas pembungkus rolol yang digulung-gulung) dan dijepit dengan potongan lidi, pada saat shabu dibakar kemudian lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) menghisap asapnya melalui ujung pipet yang lainnya secara bergantian dengan terdakwa didalam kamar pos ronda tersebut, sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang memeriksa pos ronda tersebut dan menemukan lelaki Muhammad Irsal als Risal (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa saat menggunakan shabu, sehingga langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab 24614/NNF/X?2015, tanggal 19 oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S, Si, Msi; Usaman, S,Si; Hasura Muyadi, Amd selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Slamet Isawanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0047 gram; 1 (satu) potongan plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0015 gram; 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Roy Marthen als Roy dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Muhammad Irsal als risal adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.3 Tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir)

Tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Registrasi Perkara: tanggal 4 Desember 2015, Nomor : REG.PERK : PDM-

70/Mrs/Euh.1/12/2015, dan PDM-71/Mrs/Euh.1/12/2015, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

a) Pututsan Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs

- 1) Menyatakan terdakwa Muhammad Irsal als Risal Bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Roy Marthen als Roy Bin Danunan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan
 - 2 (dua) buah korek api
 - 1 (satu) buah botol air mineral dan pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 6 (enam) buah pipet warna putih yang telah terpotong
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening yang telah terpotong
 - 1 (satu) buah kertas foil rokok warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk tunggal mas
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya berkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b) Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs

- 1) Menyatakan terdakwa Roy Marthen als Roy Bin Danunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Roy Marthen als Roy Bin Danunan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan
 - 2 (dua) buah korek api
 - 1 (satu) buah botol air mineral dan pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 6 (enam) buah pipet warna putih yang telah terpotong
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening yang telah terpotong
 - 1 (satu) buah kertas foil rokok warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk tunggal mas
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya berkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1.4 Analisis Penulis

Setelah penulis membaca surat dakwaan penuntut umum, maka penulis berkesimpulan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP. yakni memuat identitas terdakwa (syarat formil) dan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (syarat materiil)

Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik yang kemudian telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor: PDM-70/Mrs/Euh.1/12/2015 dan PDM-71/Mrs/Euh.1/12/2015 PN Mrs ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika dan KUHPidana, yakni Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 alternatif kesatu dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana alternatif Kedua.

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Muhammad Irsal als. Risal Bin Darwis, Roy Marthen als Roy Bin Yusuf Danunan. Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya megajukan alat-alat bukti yakni :

- a. Alat bukti keterangan saksi (Saksi Bryan Af Rahmat, saksi Muh.Isar bin Amsa),
- b. keterangan terdakwa (Roy_Marten_als_Roy_bin_Yusun_Danunan dan Muhammad Irsal bin Darwis), dan
- c. Alat bukti surat (hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar).

1.5 Amar Putusan

a) Putusan Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irsal bin Darwis als Risal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

- melakukan tindak pidana “ Turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat 0.0047 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat 0.0015 gram.
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk vitamin orange pada penutupnya di lubangi dua lubang tedapat 2 (dua) potong pipet warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas foil rokok warna kuning emas.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih bersama simcard dengan nomor panggilan 081355849461.
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari senin tanggal 14 desember 2015.

b) Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.

- a. Terdakwa Roy Marthen Als Roy bin Yusuf Danunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berda dalam tahanan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat 0.0047 gram.

- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0.0015 gram.
- 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk vitamin orange pada penutupnya dilubangi dua lubang tedapat 2 (dua) potong pipet warna putih.
- 1 (satu) lembar kertas foil rokok warna kuning emas.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih bersama simcard dengan nomor panggilan 081355849461.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

1.6 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a) Putusan Perkara Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs

- a. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
 - Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
 - Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
- b. Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati fakta yang ada dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Setiap Penyalahguna;
 2. Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;
 3. Narkoba Golongan I.
 4. Turut serta.

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

- a. Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan bahwa siapa saja warga negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa Muhammad Irsal Bin Darwis Als Risal sebagai warga Negara Republik Indonesia, yang diposisikan sebagai Terdakwa.

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Bagi Diri Sendiri

- a. Menimbang bahwa unsur ini terpenuhi berdasarkan saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawah ini sebagai berikut :
- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 oktober 2015 sekitar pukul 00.15 wita di pos ronda di BTN Maccopa Indah Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros, Terdakwa bersama dengan Roy telah menggunakan narkoba. Dan ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) sasetan plastik bekas pakai shabu yang pada ujung saset tersebut telah tergunting dan 1 (satu) sasetan plastik (masih utuh) juga bekas pakai shabu, selain itu ditemukan pula alat hisap shabu yang dibuat dari botol minuman merk you.C1000 dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang pada masing-masing lubang terdapat pipet putih serta 1 (satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah pipet putih. Barang ini ditemukan di dalam kamar pos ronda dan merupakan milik terdakwa dan Roy.
- c. Bahwa cara Trdakwa bersama Roy menggunakan nakoba yakni menggunakan alat hisap (bong) yang terdakwa rakit sendiri, dimana bong tersebut terdakwa buat dari botol minuman you.C1000 yang penutupannya terdapat 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang terdapat pipet putih, selanjutnya pada ujung pipet yang satu di sambung dengan pireks kaca sedikit semi sedikit kemudian pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu (terbuat dari kertas pembungkus rokok digulung-gulung) dan dijepit dengan potongan lidi tersebut, pada saat shabu dibakar selanjutnya terdakwa hisap asapnya melalui ujung pipet yang lainnya secara bergantian dengan Roy.
- d. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba dari wawan yang tinggal di jalan Tanggung Kota Maros dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memesan mellalui telepon kepada wawan yang uang tersebut hasil patungan dengan Roy. Terdakwa bersama Roy tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Terdakwa telah mengkonsumsi

shabu sejak tahun 2014 dan terdakwa belum kecanduan. Adapun efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu yakni perasaan enak, tindak mengantuk dan kuat bekerja.

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum.

A.d. 3 Unsur Narkotika Golongan I

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor: Lab-24614/NNF/X/2015, tanggal 19 oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S Si, Msi; Usman, S, Si; Hasuran Mulyani, Amd selaku pemeriksa, dan diketahui Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netti 0,0047 gram; 1 (satu) potongan plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0015 gram; 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Roy Marthen Als Roy dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Muhammad Irsal Als Risal adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undnag RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- b. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut kami telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.4. Unsur Turut Serta

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jika terdakwa menggunakan narkotika bersama dengan Roy Marthen (dalam perkara lain).
- b. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHAPidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana

yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

- d. Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.
- e. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggungkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa untuk tetap berda dalam tahanan.
- g. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bekas pakai sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,0047 gram.
 - 1 (satu) saset plastik bekas pakasi sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,0015 gram.
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk vitamin orange pada penutupnya dilubangi dua lubang terdapat 2 (dua) potong pipet warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas foil rokok warna kuning emas.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih bersama simcard dengan nomor panggilan 081355849461.
- h. Maka telah diakui keberadaanya dalam melakukan tindak pidana dan masih dipergunakan dalam perkara nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs an. Roy Marthen maka statusnya akan dipergunakan dalam perkara nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs an Roy Marthen.
- i. Menimabgn, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan didepan persidangan.

b) Putusan Perkara Npmor 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs

- a. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
 - Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
 - Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.
- b. Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati fakta yang ada dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Setiap Penyalahguna;
 2. Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;
 3. Narkotika Golongan I.
 4. Turut serta.

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

- a. Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan bahwa siapa saja warga negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa Roy Marthen Als Roy Bin Danunan sebagai warga negara Republik Indonesia, yang diposisikan sebagai Terdakwa.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Bagi Diri Sendiri

- a. Menimbang bahwa unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dibawah ini sebagai berikut :
- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 oktober 2015 sekitar pukul 00.15 wita di pos ronda di BTN Maccopa Indah Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros, Terdakwa bersama dengan Irsal telah menggunakan narkoba. Dan ditemukan pada saat itu berupa 1 (satu) sasetan plastik bekas pakai shabu yang pada ujung saset tersebut telah tergunting dan 1 (satu) sasetan plastik (masih utuh) juga bekas pakai shabu, selain itu ditemukan pula alat hisap shabu yang dibuat dari botol minuman merk you.C1000 dimana pada penutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang pada masing-masing lubang terdapat pipet putih serta 1 (satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah pipet putih. Barang ini ditemukan di dalam kamar pos ronda dan merupakan milik terdakwa dan Irsal.
- c. Bahwa cara Trdakwa bersama Irsal menggunakan nakoba yakni menggunakan alat hisap (bong) yang terdakwa rakit sendiri, dimana bong tersebut terdakwa buat dari botol minuman you.C1000 yang penutupnnya terdapat 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang terdapat pipet putih, selanjutnya pada ujung pipet yang satu di sambung dengan pireks kaca sedikit semi sedikit kemudian pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu (terbuat dari kertas pembungkus rokok digulung-gulung) dan dijepit dengan potongan lidi tersebut, pada saat shabu dibakar selanjutnya terdakwa hisap asapnya melalui ujung pipet yang lainnya secara bergantian dengan Irsal.
- d. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba dari wawan yang tinggal di jalan Tanggung Kota Maros dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memesan mellalui telepon kepada Wawan yang uang tersebut hasil patungan dengan Irsal. Terdakwa bersama Irsal tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014 dan terdakwa belum kecanduan. Adapun efek yang terdakwa rasakan

setelah mengkonsumsi shabu yakni perasaan enak, tindak mengantuk dan kuat bekerja.

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum.

A.d. 3 Unsur Narkotika Golongan I

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor: Lab-24614/NNF/X/2015, tanggal 19 oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan, S Si, Msi; Usman, S, Si; Hasuran Mulyani, Amd selaku pemeriksa, dan diketahui Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netti 0,0047 gram; 1 (satu) potongan plastik berisikan kristal bening berat netto 0,0015 gram; 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Roy Marthen Als Roy dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Muhammad Irsal Als Risal adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut kami telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.4. Unsur Turut Serta

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika terdakwa menggunakan narkotika bersama dengan Muh. Irsal (dalam perkara lain).
- b. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHAPidana, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHAPidana.

- d. Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.
- e. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- g. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bekas pakai sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,0047 gram.
 - 1 (satu) saset plastik bekas pakai sudah dipotong berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,0015 gram.
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca merk vitamin orange pada penutupnya dilubangi dua lubang terdapat 2 (dua) potong pipet warna putih.
 - 1 (satu lembar kertas foil rokok warna kuning emas.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih bersama simcard dengan nomor panggilan 081355849461.
- h. Telah diakui keberadaannya dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan.
- i. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

 - Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di depan persidangan.

1.7 Analisis Penulis

Setelah membaca Putusan Perkara Nomor. 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs, Penulis berkesimpulan bahwa putusan yang disusun telah memenuhi syarat-syarat suatu putusan (putusan pemidanaan) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 KUHP, yakni memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan : “DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa “
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan,
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan,
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim,
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan,
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti,
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan,
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan perkara No. 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs ini telah sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika KUHPidana yang berlaku. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan. Hal ini dijatuhkan sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor

140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
yang menyatakan bahwa :

bahwa untuk menentukan pidana yang akan
dijatuhkan terhadap terdakwa. Perlu dipertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan meringankan dalam pengambilan
keputusan hakim :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Akibat perbuatannya dapat merusak generasi muda;
- 2) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan;
- 2) Berlaku supan didepan persidangan.

Setelah penulis membaca dan meneliti Putusan
Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan
141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs di atas, maka penulis sependapat
dengan majelis hakim bahwa kedua terdakwa telah
melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP:

Pasal 127:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 55:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memekai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Dengan terbuktinya perbuatan kedua terdakwa di persidangan dan dengan pertimbangan hakim baik pertimbangan hukum dan pertimbangan subyektif, majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada keduanya dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Penulis sependapat dengan lamanya hukuman tersebut dengan alasan bahwa keduanya hanyalah sebagai penyalah guna yang ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun. Namun karena berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa mereka menyalahgunakan narkoba sejak tahun 2014 (selama dua tahun). Oleh karena itu menurut penulis bahwa para terdakwa sudah tergolong pecadu dan wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut di atas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut.

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan 141/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar (alat bukti surat) serta adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Muhammad Irsal als Risal Bin Darwis dan Roy Marthen als Roy Bin Danunan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama” dan di jatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan.

2. Pertimbangan hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHPidana yang berlaku.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan terdakwa tidak bisa lepas dari tuntutan tersebut. Dalam memeriksa dan meneliti suatu perkara hendaknya lebih berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan dan melanggar hak asasi

manusia utamanya terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.

2. Bagi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah tergolong pecandu, sebaiknya majelis hakim selain menjatuhkan pidana juga memutuskan untuk supaya terdakwa menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, ***Hukum Pidana 1***, Sinar Grafik, Jakarta
- Antonius Sudirman, 2009, ***Ekosistem Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial-Suatu Kajian dan Praktik di Indonesia***, BP Undip, Semarang
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, ***Hukum Korporasi Rumah Sakit***, Rangkang Education, Yogyakarta
- _____, 2012, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 1993, ***Hukum Pidana II***, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Erdianto Efenddi, 2011, ***Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar***, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Haeranah, 1990, ***Tinjauan Tentang Delik Penganiayaan yang Terjadi di Kabupaten Soppeng Tingkat II Soppen***, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Hari Sasangka, 2003, ***Narkotika dan Psykotropika Dalam Hukum Pidana***, Mandar Maju, Bandung
- H.M. Ridha Ma'ruf, 1976, ***Narkotika dan Bahayanya***, Marga djaja, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, ***Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana***, PT. Citra Aditya, Bandung
- Moeljanto, 1985, ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Ninie Suparmi, 2007, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta
- O.C. kaligis, 2002, ***Narkotika dan Peradilannya di Indonesia***, PT. Alumni, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 1997, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya, Bandung

S.R. Sianturi, 1993, ***Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya***,
Alumnu Ahaem Petehaem, Jakarta

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, ***Hukum Pidana I***, CV. ARMICO, Bandung

Taufik Makaro dkk, 2003, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia,
jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***,
PT. Eresco, Bandung

_____, 2009, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***,
Rafika, Bandung

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang Hukum Pidana